

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : RDP Komisi I DPR-RI dengan KASAD
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 27 Pebruari 2007
Pukul : 14.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh KASAD
3. Tanya jawab
4. Penutup.
Hadir Anggota : 47 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : KASAD, Sdr. Jenderal TNI Djoko Santoso beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KASAD pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

1. Sampai saat ini di beberapa daerah masih sering terjadi sengketa tanah antara TNI-AD dengan masyarakat yang telah mengganggu hubungan dan menimbulkan ketegangan antara anggota TNI-AD dengan masyarakat setempat. Terkait dengan masalah ini, Komisi I DPR RI minta KASAD membuat program untuk menyelesaikan beberapa tanah milik TNI-AD yang masih bersifat sengketa dan Komisi I DPR RI mendorong dan siap memediasi pertemuan antara TNI-AD dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tercapai penyelesaian yang komprehensif dan solusi yang terbaik.

2. Dalam upaya penertiban penghunian rumah rumah dinas (Rumdis) TNI-AD. Komisi I DPR RI minta KASAD agar penertiban dilakukan dengan cara damai, dan bermartabat dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta kebutuhan tempat penghunian bagi para penghuni lama (purnawirawan). Dalam hubungan ini secara khusus Komisi I DPR RI minta upaya penyelesaian persoalan Rumdis di Makasar dilakukan dengan pendekatan manusiawi, tidak melakukan penggusuran, tetap berdasarkan ketentuan hukum, dan dengan memperhatikan kebutuhan rumah dinas TNI-AD serta penghargaan yang wajar kepada para purnawirawan.
3. Komisi I DPR RI minta KASAD menyampaikan secara rinci dan tertulis rencana pengadaan alutsista yang didukung Kredit Ekspor (KE) agar Komisi I DPR RI dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya termasuk memberikan dukungan anggaran bagi program tersebut. Dalam hubungan dengan rencana pembelian Helikopter Sokhol hendaknya dipertimbangkan secara matang dan dibahas dengan Komisi I DPR RI terutama terkait dengan kemampuan dan kompatibilitasnya (kesesuaiannya) dengan kondisi Indonesia, mengingat dalam beberapa pembelian alutsista selama ini terdapat juga yang tidak cocok dengan kondisi di Indonesia, sehingga pemanfaatannya tidak optimal.
4. Komisi I DPR RI minta kepada KASAD untuk meningkatkan petunjuk dan penjelasan aturan penjabaran doktrin TNI-AD sehingga pelaksanaan tugas prajurit pada tingkat Kodim ke bawah dapat dilaksanakan sesuai dengan doktrin, kurikulum, dan reformasi paradigma TNI.
5. Dalam rangka mendorong pengembangan industri pertahanan nasional, komisi I DPR RI minta KASAD agar dalam program kerjasama militer dengan luar negeri supaya ditingkatkan potensi, kemampuan, produksi dan pemasaran produk-produk industri pertahanan Indonesia. Untuk itu dalam program pengadaan Alutsista TNI-AD seperti antara lain MI-17, MI-35 dan Sokol, perlu ditingkatkan kerjasama teknis serta local content untuk mengembangkan industri pertahanan nasional dengan kemampuan ganda bagi kebutuhan sipil dan non militer.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.45 WIB.

KETUA,

THEO L. SAMBUAGA

